

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional dan merupakan potensi dan asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Potensi perikanan laut tersebut meliputi perikanan tangkap, budi daya laut, dan industri bioteknologi kelautan. Oleh karena itu pengelolaan potensi perikanan ini perlu diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang (Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan).

Sejalan dengan itu pemerintah Indonesia melalui program *Nawacita* berusaha menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD) yakni sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Sektor perikanan tangkap menjadi andalan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan peran strategis antara lain:

- (1) penyedia lapangan kerja khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir dan

sekitar perairan umum daratan; (2) penyedia bahan pangan (protein hewani) bagi masyarakat; (3) penghasil devisa bagi negara (melalui ekspor komoditas perikanan); (4) pendorong tumbuhnya industri-industri lain terkait; dan (5) penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk mengembangkan sektor perikanan tangkap, Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap yang dijabarkan ke dalam kegiatan utama yakni: (1) pengelolaan sumber daya ikan; (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan; (3) pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan; (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil; (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan; (6) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen perikanan tangkap. Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh partisipasi, kerjasama, dan dukungan semua pihak. Oleh sebab itu, pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik dari pelaku usaha, akademisi, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan nelayan, Ditjen Perikanan tangkap pada tahun 2018 menyiapkan beberapa program yaitu pembangunan kapal perikanan sebanyak 522 unit, 1.702 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan, mesin kapal perikanan sejumlah 500 unit, bengkel kapal perikanan di 1 lokasi, 4 lokasi SKPT, 4 lokasi TPI perairan darat, 3 lokasi kedai

nelayan, 10 lokasi kampung nelayan, 15 lokasi TPI higienis, dan 500.000 premi asuransi nelayan. (www.djpt.kkp.go.id)

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu dari tiga daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat sehingga pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan percepatan pembangunan khususnya pembangunan perekonomian masyarakat. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Topografi wilayah Kepulauan Mentawai dikelilingi oleh laut, sehingga daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dari sektor perikanan. Sebanyak 3.843 orang masyarakat Kepulauan Mentawai berprofesi sebagai nelayan, dengan rincian 1.777 merupakan nelayan penuh (*full time*) sedangkan sisanya sebanyak 1.100 orang merupakan nelayan sambilan utama (paruh waktu) dan 966 merupakan nelayan sambilan tambahan. Pada tahun 2016 produksi ikan Kepulauan Mentawai sebanyak 6.920 ton atau meningkat 31,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.252 ton. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi lestari perikanan laut sebesar 269.682 ton/tahun. Potensi laut Kepulauan Mentawai senilai 7 triliun rupiah memang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Mentawai terkhususnya masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017).

Pada umumnya nelayan yang ada di Kepulauan Mentawai adalah nelayan tradisional yang memiliki alat tangkap sederhana berupa sampan, pancing dan jaring. Menurut Masyhuri Imron (dalam jurnal Kemiskinan dalam Masyarakat, 2003), bahwa untuk meningkatkan kehidupan nelayan perlu adanya

teknologi penangkapan, baik dalam bentuk alat tangkap maupun alat bantu penangkapan (perahu). Nelayan sangat tergantung dengan teknologi penangkapan, karena nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air yang selalu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan mempengaruhi wilayah tangkap atau daya jelajah penangkapan ikan. Dengan alat tangkap yang sederhana, nelayan di Kepulauan Mentawai jangkauan wilayah tangkapnya pun menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Akibatnya hasil tangkapannya pun menjadi terbatas dan pada musim tertentu atau musim badai tidak ada hasil tangkapan yang bisa diperoleh.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan maka pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 melalui pembangunan kedaulatan pangan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan industri, usaha kecil dan menengah. Pembangunan perekonomian masyarakat dilakukan melalui program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, sentra kelautan dan perikanan terpadu, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan industri kecil dan menengah.

Salah satu isu strategis permasalahan sektor kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan

peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan. Strategi kebijakan yang disusun terhadap pemanfaatan potensi kelautan adalah pengembangan dan pengelolaan sentra perikanan dan kelautan terpadu dengan arah kebijakan yaitu (1) pembangunan dan pengembangan kelembagaan nelayan; (2) pembangunan dan pengembangan modernisasi alat tangkap ikan; (3) pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan dan; (4) Pengembangan kemitraan nelayan dengan investor.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan modernisasi alat tangkap ikan di atas, pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai melalui dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan program unggulan yaitu sentra kelautan dan perikanan terpadu dan pengembangan perikanan tangkap. Pemerintah berusaha mengembangkan perikanan tangkap dengan menerapkan kebijakan motorisasi penangkapan ikan dalam perikanan untuk menjadikan nelayan berubah dari *peasant fisher* (berorientasi memenuhi kebutuhan sehari-hari) menjadi *post-peasant fisher* (menggunakan teknologi penangkapan berupa motor tempel atau kapal motor). Sehingga memberi peluang kepada nelayan menangkap ikan di perairan yang lebih jauh dan memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak (Arif Satria, 2009:337).

Kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sasaran program ini adalah nelayan tradisional, karena selama ini kelompok

nelayan tradisional memiliki kekurangan dan ketidakberdayaan untuk dapat memanfaatkan potensi laut yang melimpah. Melalui program ini, diharapkan akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi nelayan tradisional yang selama ini rentan dengan kemiskinan. Sementara itu potensi sektor kelautan kabupaten Kepulauan Mentawai yang cukup melimpah tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hidup para nelayan.

Bantuan peralatan penangkapan ikan yang diberikan secara hibah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diberikan kepada nelayan termasuk dalam kategori alat bantu penangkapan (mesin motor 5 pk) dan alat tangkap (pancing dan jaring) dimana dengan alat tangkap tersebut hasil tangkapan diharapkan akan lebih banyak jika dibandingkan dengan cara tradisional namun tidak semua kelompok nelayan mendapatkan jenis alat tangkap yang sama untuk setiap kelompok. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada kelompok nelayan tradisional sesuai dengan jenis bantuan yang tertuang dalam proposal yang diajukan oleh kelompok nelayan.

Kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program pengembangan perikanan tangkap ini dilaksanakan hampir seluruh wilayah pesisir kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mekanisme penyerahan bantuan hibah melalui kelompok-kelompok nelayan yang telah ada dan telah terdata pada dinas perikanan. Kelompok nelayan ini terdiri dari pengurus kelompok dan anggota kelompok dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok. Kelompok nelayan dibentuk dengan syarat yaitu; (1) anggota kelompok adalah nelayan dan minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang; (2) dikukuhkan oleh kepala

desa; (3) memiliki SKTK (surat keterangan terdaftar kelompok). Seluruh mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan program pengembangan perikanan tangkap ini dilakukan melalui pengurus kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Bantuan hibah yang diberikan dalam program ini berupa mesin boat 5 pk, mesin long tail dan alat tangkap (jaring dan pancing) sehingga diharapkan perekonomian masyarakat khususnya nelayan bisa berkembang dalam mencukupi kebutuhannya dan meningkatkan produksi ikan laut di kabupaten Kepulauan Mentawai.

Desa Goisooinan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sipora Utara dimana kecamatan ini terdiri dari enam desa yaitu: (1) desa Betumonga; (2) desa Goisooinan; (3) desa Tuapejat; (4) desa Sido Makmur; (5) desa Bukit Pamewa; (6) desa Sipora Jaya. Terletak kira-kira 9 kilometer dari Tuapejat yang merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masyarakat di kabupaten Kepulauan Mentawai dan khususnya desa Goisooinan memiliki mata pencaharian pada umumnya berasal dari sektor agraris atau bidang pertanian yaitu bertani dan menjadi nelayan. Bertani, berladang dan melaut menjadi mata pencarian yang utama bagi masyarakat yang tinggal di desa ini.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan produksi ikan laut, berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 282 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 400 Tahun 2016, kelompok nelayan pada desa Goisooinan menerima bantuan melalui program pengembangan perikanan tangkap dan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada
Kelompok Nelayan Desa Goisooinan

No	Kelompok Penerima	Jenis Bantuan	Jumlah (Unit)	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	Ron Akek	Mesin boat 5 Pk	10 unit	10 orang	Dusun Pogari
2.	Surak Sita	Mesin boat 5 Pk	14 unit	14 orang	Dusun Adduru
3.	Rop Akek	Mesin boat 5 Pk	10 unit	10 orang	Dusun Pogari

Sumber: Dinas Perikanan Kepulauan Mentawai 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan bantuan program perikanan tangkap dilakukan melalui kelompok nelayan dan masing-masing kelompok memiliki pengurus. Keanggotaan kelompok nelayan dibuktikan dengan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan sebagai salah satu syarat menjadi penerima bantuan. Kelompok nelayan di Goisooinan ada 4 (empat) kelompok yaitu: (1) Ron Akek; (2) Surak Sita; (3) Rop Akek; (4) Camar Laut. Kelompok nelayan Ron Akek, Surak Sita dan Rop Akek terbentuk pada tahun 2014 sedangkan kelompok nelayan Camar Laut dibentuk pada tahun 2015, sementara program pengembangan perikanan tangkap di Goisooinan dilaksanakan pada tahun 2016. Kelompok Camar Laut tidak menerima bantuan dari program pengembangan perikanan tangkap karena proposal mereka belum disetujui oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kelompok nelayan Camar Laut memiliki anggota 30 (tiga puluh) orang dan secara keseluruhan jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan adalah 64 (enam puluh empat) orang.

Jumlah nelayan yang terdata merupakan nelayan yang terbentuk dalam kelompok nelayan dan sebagian penerima bantuan melalui program pengembangan perikanan tangkap. Pada umumnya nelayan yang ada di

Goisooinan adalah nelayan tradisional. Hasil tangkapannya nelayan tradisional ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan diinvestasikan untuk pengembangan usaha penangkapan (Arif Satria, 2009:337). Bila melihat bantuan hibah program pengembangan perikanan tangkap ini, terdapat perubahan yang terjadi dalam penggunaan alat produksi berupa mesin tempel sebagai sentuhan modernisasi atau motorisasi penangkapan ikan laut. Oleh karena itu diharapkan nelayan dapat meningkatkan pendapatan hasil tangkapan ikannya dan berorientasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga menjual hasil tangkapannya.

Dinas perikanan kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program pengembangan perikanan tangkap dan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan telah membangun akses untuk pemasaran yaitu TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tuapejat yang berjarak sekitar 9 km dari desa Goisooinan dan akses penghubung ke TPI dari Goisooinan pun telah ada. Oleh karena itu diharapkan masyarakat nelayan yang ada di Goisooinan menjual hasil tangkapan ikannya ke TPI. Selain itu hasil tangkapan nelayan juga telah bisa disimpan sementara dalam lemari pendingin karena desa Goiooinan telah menikmati adanya penerangan listrik dari PLN Tuapejat.

Uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini difokuskan kepada upaya menggali informasi tentang pengembangan ekonomi masyarakat nelayan melalui program pengembangan perikanan tangkap.

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah potensi bidang kelautan. Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengatasi kemiskinan berupaya mengembangkan ekonomi masyarakat atau sumber mata pencaharian dan salah satunya adalah menggalakkan usaha perikanan. Pengembangan mata pencaharian khususnya bidang kelautan perikanan oleh dinas Perikanan kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan kebijakan motorisasi penangkapan ikan melalui program perikanan tangkap yaitu pemberian bantuan mesin (alat bantu tangkap bagi nelayan khususnya di desa Goisooinan. Hal ini dilakukan mengingat nelayan yang ada di kabupaten Kepulauan Mentawai dan khususnya desa Goisooinan adalah nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap dan alat bantu tangkap yang terbatas. Untuk mengembangkan program perikanan tangkap perlu adanya dukungan dari kelompok masyarakat khususnya nelayan, namun yang terjadi tidak terlihat adanya perkembangan hasil tangkap nelayan setelah menerima bantuan mesin motor (alat bantu tangkap). Sebagai pendukung dalam pelaksanaan program perikanan tangkap ini telah dibangun fasilitas seperti TPI sebagai akses pemasaran, akses jalan ke TPI dan tersedianya jaringan listrik, tetapi usaha mata pencaharian nelayan dalam memenuhi kebutuhannya tidak berkembang. Hasil penangkapan ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjual kepada masyarakat atau TPI Tuapejat meskipun dalam skala kecil belum sepenuhnya terpenuhi. TPI sebagai tempat pemasaran yang berjarak 9 km dari Goisooinan belum menjadi tujuan pemasaran masyarakat nelayan Goisooinan.

Berdasarkan masalah di atas yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Apa penyebab tidak berhasilnya kebijakan motorisasi penangkapan ikan dalam pengembangan ekonomi nelayan di Desa Goisooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan penyebab ketidakberhasilan kebijakan motorisasi penangkapan ikan dalam pengembangan ekonomi nelayan di Desa Goisooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan proses pendistribusian bantuan program perikanan tangkap kepada kelompok nelayan.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan pemanfaatan program perikanan tangkap.
3. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pengembangan ekonomi nelayan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian ilmu sosial yaitu Sosiologi Pembangunan.



1.4.2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengoptimalkan usaha ekonomi masyarakat bidang perikanan melalui kelompok nelayan di kabupaten Kepulauan Mentawai.

